KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 07231/PP.08.01/04/2026 Jakarta, 17 April 2026
Lampiran : 1(satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Evaluasi Penyelenggaraan SDI 2025 (Indeks 2026)

Kepada Yth.
(Terlampir)

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, terdapat indikator Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI) yang menjadi bagian dari Prioritas Nasional 7. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat akan melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2025 pada tingkat pusat dan daerah, yang hasilnya akan menjadi nilai Indeks SDI Tahun 2026 dalam dokumen RPJMN, dengan target indeks sebesar 71–90.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indeks SDI 2026 menilai penyelenggaraan SDI Tingkat Pusat dan Daerah yang dilaksanakan oleh Walidata, Produsen Data, Koordinator Forum SDI dalam kurun waktu Januari 2025 - Mei 2026.
2. Sehubungan dengan butir 1 Walidata masing-masing dapat mengunggah bukti dukung yang mendukung penyelenggaraan SDI dalam kurun waktu Januari 2025– Mei 2026.
3. Penilaian Indeks SDI 2026, khususnya indikator yang menilai Data Prioritas, yaitu indikator 9, 10, 11, 12, 13, dan 14, dapat menggunakan basis Data Prioritas 2025 baik pada Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.
4. Beberapa indikator dan kriteria minimum (sebagaimana terlampir) masih dapat ditingkatkan untuk penilaian Indeks SDI Tahun 2026, dengan melengkapi bukti dukung dalam kurun waktu periode penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 2.
5. Rencananya, kegiatan Sosialisasi Indeks SDI Tahun 2026 akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pembagian wilayah, yaitu Indonesia Bagian Timur, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Barat, yang dimulai pada tanggal 11 Mei 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendampingan akan dilaksanakan oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sekretariat SDI Tingkat Pusat kepada instansi pusat dan/atau daerah, dengan jadwal yang akan disampaikan lebih lanjut. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud, Saudara dapat menghubungi Sdri. Finda (+62 822-8467-9108) dan Sdr. Aldi (+62 812-4883-1386).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital
selaku Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia



Dini Maghffira

Tembusan:
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : 07231/PP.08.01/04/2026
Tanggal : 17 April 2026

Daftar Pejabat Penerima Surat

Walidata Kementerian/Lembaga

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Kementerian Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum;
11. Kementerian Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
13. Kementerian Keuangan;
14. Kementerian Pertanian;
15. Kementerian Perindustrian;
16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Kementerian Perhubungan;
18. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
20. Kementerian Kebudayaan;
21. Kementerian Kesehatan;
22. Kementerian Agama;
23. Kementerian Ketenagakerjaan;
24. Kementerian Sosial;
25. Kementerian Lingkungan Hidup;
26. Kementerian Kehutanan;
27. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
28. Kementerian Pekerjaan Umum;
29. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
30. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan;
31. Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
32. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
33. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
34. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
35. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat;
36. Kementerian Koordinator Pangan;
37. Kementerian Pariwisata;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

38. Kementerian Ekonomi Kreatif;
39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
40. Kementerian Koperasi;
41. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
42. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
43. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
44. Badan Intelijen Negara;
45. Badan Siber dan Sandi Negara;
46. Badan Pusat Statistik;
47. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
48. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona
49. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
50. Kementerian Komunikasi dan Digital;
51. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
52. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
53. Lembaga Ketahanan Nasional;
54. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
55. Badan Narkotika Nasional;
56. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
57. Kementerian Transmigrasi;
58. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
59. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
60. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
61. Komisi Pemilihan Umum;
62. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
63. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
64. Badan Informasi Geospasial;
65. Badan Standardisasi Nasional;
66. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
67. Lembaga Administrasi Negara;
68. Arsip Nasional Republik Indonesia;
69. Badan Kepegawaian Negara;
70. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
71. Kementerian Perdagangan;
72. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
73. Komisi Pemberantasan Korupsi;
74. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
75. Komisi Yudisial Republik Indonesia;
76. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
77. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
78. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
79. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
80. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
81. Ombudsman Republik Indonesia;
82. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
83. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);
84. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

85. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
86. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
87. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
88. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS);
89. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
90. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
91. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
92. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
93. Badan Pangan Nasional;
94. Otorita Ibu Kota Nusantara;
95. Badan Karantina Indonesia;
96. Badan Penyelenggara Haji dan Umrah;
97. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
98. Badan Gizi Nasional.

Walidata dan Koordinator Forum SDI Instansi/ Koordinator Sekretariat SDI Instansi Daerah Provinsi

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Bengkulu
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Riau
7. Provinsi Kepulauan Riau
8. Provinsi Sumatera Selatan
9. Provinsi Bangka Belitung
10. Provinsi Lampung
11. Provinsi Banten
12. Provinsi DKI Jakarta
13. Provinsi Jawa Barat
14. Provinsi Jawa Tengah
15. Provinsi DI Yogyakarta
16. Provinsi Jawa Timur
17. Provinsi Bali
18. Provinsi Kalimantan Barat
19. Provinsi Kalimantan Tengah
20. Provinsi Kalimantan Utara
21. Provinsi Kalimantan Timur
22. Provinsi Kalimantan Selatan
23. Provinsi Sulawesi Utara
24. Provinsi Gorontalo
25. Provinsi Sulawesi Barat
26. Provinsi Sulawesi Tengah
27. Provinsi Sulawesi Selatan
28. Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Provinsi Nusa Tenggara Barat
30. Provinsi Nusa Tenggara Timur
31. Provinsi Maluku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

32. Provinsi Maluku Utara
33. Provinsi Papua
34. Provinsi Papua Barat
35. Provinsi Papua Selatan
36. Provinsi Papua Tengah
37. Provinsi Papua Pegunungan
38. Provinsi Papua Barat Daya

Walidata dan Koordinator Forum SDI Instansi/ Koordinator Sekretariat SDI Instansi Daerah Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Aceh Selatan
2. Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kabupaten Aceh Timur
4. Kabupaten Aceh Tengah
5. Kabupaten Aceh Barat
6. Kabupaten Aceh Besar
7. Kabupaten Pidie
8. Kabupaten Aceh Utara
9. Kabupaten Simeulue
10. Kabupaten Aceh Singkil
11. Kabupaten Bireuen
12. Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Kabupaten Gayo Lues
14. Kabupaten Aceh Jaya
15. Kabupaten Nagan Raya
16. Kabupaten Aceh Tamiang
17. Kabupaten Bener Meriah
18. Kabupaten Pidie Jaya
19. Kota Banda Aceh
20. Kota Sabang
21. Kota Lhokseumawe
22. Kota Langsa
23. Kota Subulussalam
24. Kabupaten Tapanuli Tengah
25. Kabupaten Tapanuli Utara
26. Kabupaten Tapanuli Selatan
27. Kabupaten Nias
28. Kabupaten Langkat
29. Kabupaten Karo
30. Kabupaten Deli Serdang
31. Kabupaten Simalungun
32. Kabupaten Asahan
33. Kabupaten Labuhanbatu
34. Kabupaten Dairi
35. Kabupaten Toba
36. Kabupaten Mandailing Natal
37. Kabupaten Nias Selatan
38. Kabupaten Pakpak Bharat
39. Kabupaten Humbang Hasundutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

40. Kabupaten Samosir
41. Kabupaten Serdang Bedagai
42. Kabupaten Batu Bara
43. Kabupaten Padang Lawas Utara
44. Kabupaten Padang Lawas
45. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
46. Kabupaten Labuhanbatu Utara
47. Kabupaten Nias Utara
48. Kabupaten Nias Barat
49. Kota Medan
50. Kota Pematangsiantar
51. Kota Sibolga
52. Kota Tanjung Balai
53. Kota Binjai
54. Kota Tebing Tinggi
55. Kota Padang Sidempuan
56. Kota Gunungsitoli
57. Kabupaten Pesisir Selatan
58. Kabupaten Solok
59. Kabupaten Sijunjung
60. Kabupaten Tanah Datar
61. Kabupaten Padang Pariaman
62. Kabupaten Agam
63. Kabupaten Lima Puluh Kota
64. Kabupaten Pasaman
65. Kabupaten Kepulauan Mentawai
66. Kabupaten Dharmasraya
67. Kabupaten Solok Selatan
68. Kabupaten Pasaman Barat
69. Kota Padang
70. Kota Solok
71. Kota Sawahlunto
72. Kota Padang Panjang
73. Kota Bukittinggi
74. Kota Payakumbuh
75. Kota Pariaman
76. Kabupaten Kampar
77. Kabupaten Indragiri Hulu
78. Kabupaten Bengkalis
79. Kabupaten Indragiri Hilir
80. Kabupaten Pelalawan
81. Kabupaten Rokan Hulu
82. Kabupaten Rokan Hilir
83. Kabupaten Siak
84. Kabupaten Kuantan Singingi
85. Kabupaten Kepulauan Meranti
86. Kota Pekanbaru
87. Kota Dumai
88. Kabupaten Kerinci
89. Kabupaten Merangin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

90. Kabupaten Sarolangun
91. Kabupaten Batanghari
92. Kabupaten Muaro Jambi
93. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
94. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
95. Kabupaten Bungo
96. Kabupaten Tebo
97. Kota Jambi
98. Kota Sungai Penuh
99. Kabupaten Ogan Komering Ulu
100. Kabupaten Ogan Komering Ilir
101. Kabupaten Muara Enim
102. Kabupaten Lahat
103. Kabupaten Musi Rawas
104. Kabupaten Musi Banyuasin
105. Kabupaten Banyuasin
106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
107. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
108. Kabupaten Ogan Ilir
109. Kabupaten Empat Lawang
110. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
111. Kabupaten Musi Rawas Utara
112. Kota Palembang
113. Kota Pagar Alam
114. Kota Lubuk Linggau
115. Kota Prabumulih
116. Kabupaten Bengkulu Selatan
117. Kabupaten Rejang Lebong
118. Kabupaten Bengkulu Utara
119. Kabupaten Kaur
120. Kabupaten Seluma
121. Kabupaten Muko Muko
122. Kabupaten Lebong
123. Kabupaten Kepahiang
124. Kabupaten Bengkulu Tengah
125. Kota Bengkulu
126. Kabupaten Lampung Selatan
127. Kabupaten Lampung Tengah
128. Kabupaten Lampung Utara
129. Kabupaten Lampung Barat
130. Kabupaten Tulang Bawang
131. Kabupaten Tanggamus
132. Kabupaten Lampung Timur
133. Kabupaten Way Kanan
134. Kabupaten Pesawaran
135. Kabupaten Pringsewu
136. Kabupaten Mesuji
137. Kabupaten Tulang Bawang Barat
138. Kabupaten Pesisir Barat
139. Kota Bandar Lampung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

140. Kota Metro
141. Kabupaten Bangka
142. Kabupaten Belitung
143. Kabupaten Bangka Selatan
144. Kabupaten Bangka Tengah
145. Kabupaten Bangka Barat
146. Kabupaten Belitung Timur
147. Kota Pangkal Pinang
148. Kabupaten Bintan
149. Kabupaten Karimun
150. Kabupaten Natuna
151. Kabupaten Lingga
152. Kabupaten Kepulauan Anambas
153. Kota Batam
154. Kota Tanjung Pinang
155. Kabupaten Bogor
156. Kabupaten Sukabumi
157. Kabupaten Cianjur
158. Kabupaten Bandung
159. Kabupaten Garut
160. Kabupaten Tasikmalaya
161. Kabupaten Ciamis
162. Kabupaten Kuningan
163. Kabupaten Cirebon
164. Kabupaten Majalengka
165. Kabupaten Sumedang
166. Kabupaten Indramayu
167. Kabupaten Subang
168. Kabupaten Purwakarta
169. Kabupaten Karawang
170. Kabupaten Bekasi
171. Kabupaten Bandung Barat
172. Kabupaten Pangandaran
173. Kota Bogor
174. Kota Sukabumi
175. Kota Bandung
176. Kota Cirebon
177. Kota Bekasi
178. Kota Depok
179. Kota Cimahi
180. Kota Tasikmalaya
181. Kota Banjar
182. Kabupaten Cilacap
183. Kabupaten Banyumas
184. Kabupaten Purbalingga
185. Kabupaten Banjarnegara
186. Kabupaten Kebumen
187. Kabupaten Purworejo
188. Kabupaten Wonosobo
189. Kabupaten Magelang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

190. Kabupaten Boyolali
191. Kabupaten Klaten
192. Kabupaten Sukoharjo
193. Kabupaten Wonogiri
194. Kabupaten Karanganyar
195. Kabupaten Sragen
196. Kabupaten Grobogan
197. Kabupaten Blora
198. Kabupaten Rembang
199. Kabupaten Pati
200. Kabupaten Kudus
201. Kabupaten Jepara
202. Kabupaten Demak
203. Kabupaten Semarang
204. Kabupaten Temanggung
205. Kabupaten Kendal
206. Kabupaten Batang
207. Kabupaten Pekalongan
208. Kabupaten Pemalang
209. Kabupaten Tegal
210. Kabupaten Brebes
211. Kota Magelang
212. Kota Surakarta
213. Kota Salatiga
214. Kota Semarang
215. Kota Pekalongan
216. Kota Tegal
217. Kabupaten Kulon Progo
218. Kabupaten Bantul
219. Kabupaten Gunungkidul
220. Kabupaten Sleman
221. Kota Yogyakarta
222. Kabupaten Pacitan
223. Kabupaten Ponorogo
224. Kabupaten Trenggalek
225. Kabupaten Tulungagung
226. Kabupaten Blitar
227. Kabupaten Kediri
228. Kabupaten Malang
229. Kabupaten Lumajang
230. Kabupaten Jember
231. Kabupaten Banyuwangi
232. Kabupaten Bondowoso
233. Kabupaten Situbondo
234. Kabupaten Probolinggo
235. Kabupaten Pasuruan
236. Kabupaten Sidoarjo
237. Kabupaten Mojokerto
238. Kabupaten Jombang
239. Kabupaten Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

240. Kabupaten Madiun
241. Kabupaten Magetan
242. Kabupaten Ngawi
243. Kabupaten Bojonegoro
244. Kabupaten Tuban
245. Kabupaten Lamongan
246. Kabupaten Gresik
247. Kabupaten Bangkalan
248. Kabupaten Sampang
249. Kabupaten Pamekasan
250. Kabupaten Sumenep
251. Kota Kediri
252. Kota Blitar
253. Kota Malang
254. Kota Probolinggo
255. Kota Pasuruan
256. Kota Mojokerto
257. Kota Madiun
258. Kota Surabaya
259. Kota Batu
260. Kabupaten Pandeglang
261. Kabupaten Lebak
262. Kabupaten Tangerang
263. Kabupaten Serang
264. Kota Tangerang
265. Kota Cilegon
266. Kota Serang
267. Kota Tangerang Selatan
268. Kabupaten Jembrana
269. Kabupaten Tabanan
270. Kabupaten Badung
271. Kabupaten Gianyar
272. Kabupaten Klungkung
273. Kabupaten Bangli
274. Kabupaten Karangasem
275. Kabupaten Buleleng
276. Kota Denpasar
277. Kabupaten Lombok Barat
278. Kabupaten Lombok Tengah
279. Kabupaten Lombok Timur
280. Kabupaten Sumbawa
281. Kabupaten Dompu
282. Kabupaten Bima
283. Kabupaten Sumbawa Barat
284. Kabupaten Lombok Utara
285. Kota Mataram
286. Kota Bima
287. Kabupaten Kupang
288. Kabupaten Timor Tengah Selatan
289. Kabupaten Timor Tengah Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

290. Kabupaten Belu
291. Kabupaten Alor
292. Kabupaten Flores Timur
293. Kabupaten Sikka
294. Kabupaten Ende
295. Kabupaten Ngada
296. Kabupaten Manggarai
297. Kabupaten Sumba Timur
298. Kabupaten Sumba Barat
299. Kabupaten Lembata
300. Kabupaten Rote Ndao
301. Kabupaten Manggarai Barat
302. Kabupaten Nagekeo
303. Kabupaten Sumba Tengah
304. Kabupaten Sumba Barat Daya
305. Kabupaten Manggarai Timur
306. Kabupaten Sabu Raijua
307. Kabupaten Malaka
308. Kota Kupang
309. Kabupaten Sambas
310. Kabupaten Mempawah
311. Kabupaten Sanggau
312. Kabupaten Ketapang
313. Kabupaten Sintang
314. Kabupaten Kapuas Hulu
315. Kabupaten Bengkayang
316. Kabupaten Landak
317. Kabupaten Sekadau
318. Kabupaten Melawi
319. Kabupaten Kayong Utara
320. Kabupaten Kubu Raya
321. Kota Pontianak
322. Kota Singkawang
323. Kabupaten Kotawaringin Barat
324. Kabupaten Kotawaringin Timur
325. Kabupaten Kapuas
326. Kabupaten Barito Selatan
327. Kabupaten Barito Utara
328. Kabupaten Katingan
329. Kabupaten Seruyan
330. Kabupaten Sukamara
331. Kabupaten Lamandau
332. Kabupaten Gunung Mas
333. Kabupaten Pulang Pisau
334. Kabupaten Murung Raya
335. Kabupaten Barito Timur
336. Kota Palangkaraya
337. Kabupaten Tanah Laut
338. Kabupaten Kotabaru
339. Kabupaten Banjar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

340. Kabupaten Barito Kuala
341. Kabupaten Tapin
342. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
343. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
344. Kabupaten Hulu Sungai Utara
345. Kabupaten Tabalong
346. Kabupaten Tanah Bumbu
347. Kabupaten Balangan
348. Kota Banjarmasin
349. Kota Banjarbaru
350. Kabupaten Paser
351. Kabupaten Kutai Kartanegara
352. Kabupaten Berau
353. Kabupaten Kutai Barat
354. Kabupaten Kutai Timur
355. Kabupaten Penajam Paser Utara
356. Kabupaten Mahakam Ulu
357. Kota Balikpapan
358. Kota Samarinda
359. Kota Bontang
360. Kabupaten Bulungan
361. Kabupaten Malinau
362. Kabupaten Nunukan
363. Kabupaten Tana Tidung
364. Kota Tarakan
365. Kabupaten Bolaang Mongondow
366. Kabupaten Minahasa
367. Kabupaten Kepulauan Sangihe
368. Kabupaten Kepulauan Talaud
369. Kabupaten Minahasa Selatan
370. Kabupaten Minahasa Utara
371. Kabupaten Minahasa Tenggara
372. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
373. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
374. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
375. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
376. Kota Manado
377. Kota Bitung
378. Kota Tomohon
379. Kota Kotamobagu
380. Kabupaten Banggai
381. Kabupaten Poso
382. Kabupaten Donggala
383. Kabupaten Toli Toli
384. Kabupaten Buol
385. Kabupaten Morowali
386. Kabupaten Banggai Kepulauan
387. Kabupaten Parigi Moutong
388. Kabupaten Tojo Una Una
389. Kabupaten Sigi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

390. Kabupaten Banggai Laut
391. Kabupaten Morowali Utara
392. Kota Palu
393. Kabupaten Kepulauan Selayar
394. Kabupaten Bulukumba
395. Kabupaten Bantaeng
396. Kabupaten Jeneponto
397. Kabupaten Takalar
398. Kabupaten Gowa
399. Kabupaten Sinjai
400. Kabupaten Bone
401. Kabupaten Maros
402. Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
403. Kabupaten Barru
404. Kabupaten Soppeng
405. Kabupaten Wajo
406. Kabupaten Sidenreng Rappang
407. Kabupaten Pinrang
408. Kabupaten Enrekang
409. Kabupaten Luwu
410. Kabupaten Tana Toraja
411. Kabupaten Luwu Utara
412. Kabupaten Luwu Timur
413. Kabupaten Toraja Utara
414. Kota Makassar
415. Kota Parepare
416. Kota Palopo
417. Kabupaten Kolaka
418. Kabupaten Konawe
419. Kabupaten Muna
420. Kabupaten Buton
421. Kabupaten Konawe Selatan
422. Kabupaten Bombana
423. Kabupaten Wakatobi
424. Kabupaten Kolaka Utara
425. Kabupaten Konawe Utara
426. Kabupaten Buton Utara
427. Kabupaten Kolaka Timur
428. Kabupaten Konawe Kepulauan
429. Kabupaten Muna Barat
430. Kabupaten Buton Tengah
431. Kabupaten Buton Selatan
432. Kota Kendari
433. Kota Bau Bau
434. Kabupaten Gorontalo
435. Kabupaten Boalemo
436. Kabupaten Bone Bolango
437. Kabupaten Pohuwato
438. Kabupaten Gorontalo Utara
439. Kota Gorontalo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

440. Kabupaten Pasangkayu
441. Kabupaten Mamuju
442. Kabupaten Mamasa
443. Kabupaten Polewali Mandar
444. Kabupaten Majene
445. Kabupaten Mamuju Tengah
446. Kabupaten Maluku Tengah
447. Kabupaten Maluku Tenggara
448. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
449. Kabupaten Buru
450. Kabupaten Seram Bagian Timur
451. Kabupaten Seram Bagian Barat
452. Kabupaten Kepulauan Aru
453. Kabupaten Maluku Barat Daya
454. Kabupaten Buru Selatan
455. Kota Ambon
456. Kota Tual
457. Kabupaten Halmahera Barat
458. Kabupaten Halmahera Tengah
459. Kabupaten Halmahera Utara
460. Kabupaten Halmahera Selatan
461. Kabupaten Kepulauan Sula
462. Kabupaten Halmahera Timur
463. Kabupaten Pulau Morotai
464. Kabupaten Pulau Taliabu
465. Kota Ternate
466. Kota Tidore Kepulauan
467. Kabupaten Jayapura
468. Kabupaten Kepulauan Yapen
469. Kabupaten Biak Numfor
470. Kabupaten Sarmi
471. Kabupaten Keerom
472. Kabupaten Waropen
473. Kabupaten Supiori
474. Kabupaten Mamberamo Raya
475. Kota Jayapura
476. Kabupaten Manokwari
477. Kabupaten Fak Fak
478. Kabupaten Teluk Bintuni
479. Kabupaten Teluk Wondama
480. Kabupaten Kaimana
481. Kabupaten Manokwari Selatan
482. Kabupaten Pegunungan Arfak
483. Kabupaten Merauke
484. Kabupaten Boven Digoel
485. Kabupaten Mappi
486. Kabupaten Asmat
487. Kabupaten Nabire
488. Kabupaten Puncak Jaya
489. Kabupaten Paniai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

490. Kabupaten Mimika
491. Kabupaten Puncak
492. Kabupaten Dogiyai
493. Kabupaten Intan Jaya
494. Kabupaten Deiyai
495. Kabupaten Jayawijaya
496. Kabupaten Pegunungan Bintang
497. Kabupaten Yahukimo
498. Kabupaten Tolikara
499. Kabupaten Mamberamo Tengah
500. Kabupaten Yalimo
501. Kabupaten Lanny Jaya
502. Kabupaten Nduga
503. Kabupaten Sorong
504. Kabupaten Sorong Selatan
505. Kabupaten Raja Ampat
506. Kabupaten Tambrauw
507. Kabupaten Maybrat
508. Kota Sorong

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : 07231/PP.08.01/04/2026
Tanggal : 17 April 2026

Domain Kebijakan dan Kelembagaan (20.0%)

Aspek	No	Indikator	No	Kriteria
Kebijakan (8.0%)	1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi Satu Data Indonesia (4.0%)	1	Peraturan sudah disusun konsep/rancangannya
			2	Peraturan sudah disusun konsep/rancangannya secara lengkap
			3	Konsep/rancangan peraturan telah dibahas dalam rapat
	2	[Pusat] Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat K/L/D (4.0%)	1	SK Penyelenggara SDI telah disusun konsep/rancangannya
			2	Forum internal/rapat terkait SK Penyelenggara SDI di Instansi telah dilaksanakan
		[Daerah] Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat K/L/D (4.0%)	1	SK Penyelenggara SDI telah disusun konsep/rancangannya
			2	Forum internal/rapat terkait SK Penyelenggara SDI di Instansi telah dilaksanakan
Kelembagaan (12.0%)	3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia (2.0%)	1	Forum Satu Data Indonesia sudah memiliki konsep atau rencana
			2	Forum Satu Data Indonesia sudah dilaksanakan
			3	Forum Satu Data Indonesia sudah sesuai dan menghasilkan kesepakatan Daftar Data
	4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat (3.0%)	1	SOP turunan sudah memiliki konsep/rancangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Domain Penyelenggaraan SDI (56.0%)

Aspek	No	Indikator	No	Kriteria
Perencanaan (14.0%)	7	Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D (6.0%)	1	Produsen Data menyampaikan usulan Daftar Data
			2	Telah dilaksanakan pembahasan dan pemeriksaan usulan Daftar Data terhadap kesesuaian tugas/fungsi dan adanya duplikasi
			3	Forum Penyepakatan Daftar Data telah dilaksanakan
	8	[Pusat] Persentase pemenuhan kriteria partisipasi aktif dalam penetapan Data Prioritas (8.0%)	1	Walidata memetakan Data Prioritas yang akan diusulkan dari Daftar Data
			2	Walidata mengumpulkan usulan Data Prioritas dari Produsen Data
			3	Walidata terlibat dalam Rapat Perencanaan Data Prioritas tingkat Pusat
			4	Walidata mengusulkan Data Prioritas ke Sekretariat SDI
			5	Walidata mengonfirmasi ketersediaan usulan Data Prioritas dengan Produsen Data
			6	Walidata mengumpulkan konfirmasi ketersediaan usulan Data Prioritas ke Sekretariat SDI
		[Daerah] Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah (8.0%)		N/A
Pengumpulan (12.0%)	9	[Pusat] Persentase Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat ke Sekretariat SDI tingkat Pusat sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan (12.0%)		N/A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		[Daerah] Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke Walidata sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan (12.0%)		N/A
Pemeriksaan (14.0%)	14	[Pusat] Persentase Data Prioritas yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas) (2.0%)		N/A
		[Daerah] Persentase Daftar Data yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas) (2.0%)		N/A
	16	[Pusat] Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata dan Pembina Data (2.0%)	1	Pemeriksaan Data Prioritas telah dilaksanakan oleh Walidata
			3	Pendampingan pemenuhan prinsip SDI terhadap Data Prioritas oleh Walidata kepada minimal 2 Produsen Data berdasarkan hasil pemeriksaan
		[Daerah] Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Daftar Data oleh Walidata (2.0%)	1	Pemeriksaan Daftar Data telah dilaksanakan oleh Walidata
			2	Pemeriksaan Daftar Data dikonsultasikan dengan Pembina Data
			3	Pendampingan pemenuhan prinsip SDI terhadap Daftar Data oleh Walidata kepada minimal 2 Produsen Data berdasarkan hasil pemeriksaan
Penyebarluasan (16.0%)	17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Portal SDI (4.0%)	1	Sudah mengajukan surat permohonan akun ke Sekretariat SDI
			2	Sudah mengajukan Surat Tugas Walidata ke Sekretariat SDI
			3	Sudah melampirkan Surat Keputusan tentang struktur kelembagaan SDI tingkat K/L/D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			4	Walidata sudah memiliki akses user ke layanan portal data.go.id
	18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI (4.0%)	1	Portal Data K/L/D sudah dalam proses rancangan
			2	Portal Data K/L/D sudah ada dan dikembangkan
			3	Portal Data K/L/D sudah memiliki sarana integrasi (API endpoint)
			4	Sudah mengajukan surat permohonan integrasi Portal ke Sekretariat SDI
			5	Portal Data K/L/D sudah terintegrasi dengan portal data.go.id
	19	[Pusat] Persentase Data Prioritas yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI (4.0%)		N/A
		[Daerah] Persentase Daftar Data yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI (4.0%)		N/A
	20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D (4.0%)	3	Walidata Instansi K/L/D sudah menerapkan Hak Akses Data dan sudah menerapkan 3 klasifikasi data: Tertutup, Terbatas, dan Terbuka

Domain Data Leadership (24.0%)

Aspek	No	Indikator	No	Kriteria
Pemanfaatan Data (12.0%)	21	Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan (3.0%)	1	Data di K/L/D sudah direncanakan pemanfaatannya (rapat/diskusi) untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
			2	Data di K/L/D sudah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan melalui Dashboard Portal K/L/D
			3	Data di K/L/D sudah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan melalui kajian data
			4	Data di K/L/D sudah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan melalui dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				Perencanaan Pembangunan K/L/D
	23	Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP (4.0%)	1	Portal K/L/D dalam proses pendaftaran SPLP
			2	Portal K/L/D sudah terdaftar di SPLP
			3	Portal K/L/D sudah terintegrasi dengan layanan lainnya melalui SPLP
Pembiayaan (6.0%)	24	Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai (2.0%)	1	Kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam proses identifikasi
			2	Kegiatan pengadaan data dan pendataan sudah diidentifikasi
	25	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D (4.0%)	1	Penyelenggaraan SDI diajukan untuk masuk ke dokumen perencanaan pembangunan K/L/D
			2	Penyelenggaraan SDI sudah masuk ke dokumen perencanaan pembangunan K/L/D
Manajemen Data (6 .0%)	26	Persentase pemenuhan kriteria manajemen arsitektur data dan informasi (3.0%)	1	Penyelenggara SDI telah melakukan rapat tentang Penyusunan Arsitektur Domain Data dan Informasi Pemerintah Digital
			2	Penyelenggara SDI sedang menyusun Arsitektur Data dan Informasi Pemerintah Digital
			3	Penyelenggara SDI telah mempunyai Arsitektur Data dan Informasi Pemerintah Digital
			4	Penyelenggara SDI telah mempunyai Arsitektur Data dan Informasi Pemerintah Digital beserta metadata
	27	Persentase pemenuhan kriteria manajemen basis data (3.0%)	1	Walidata berperan sebagai administrator basis data (Database Administrator/DBA)
			2	Walidata dalam proses pemetaan sistem basis data di Layanan/ Aplikasi Instansi Pemerintah
			3	Walidata mengakumulasi basis data yang telah didokumentasikan dan digunakan secara aktif dalam Layanan/ Aplikasi Instansi Pemerintah
			4	Penyusunan skema basis data di sebagian Layanan/ Aplikasi Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			5	Penyusunan skema basis data di seluruh Layanan/ Aplikasi Instansi Pemerintah
			6	Basis data memenuhi integritas referensial untuk menghindari duplikasi data dan inkonsistensi
			7	Adanya penjaminan ketersediaan akses Data secara terus-menerus atau *real time*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).